



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah serta unit kerja dibawahnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ayat (1) dan Ayat (2), maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Kepada Walikota Payakumbuh Tanggal 29 September 2017 Nomor 061/1700/Org-2017 Perihal Hasil Konsultasi Tertulis Pembentukan UPTD.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Payakumbuh.
2. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
11. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai

dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.

## B A B II

### PEMBENTUKAN UPTD

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Tipe A pada Dinas Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. UPTD Parkir ;
- b. UPTD Terminal ;
- c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

## B A B III

### UPTD PARKIR

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Parkir merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Parkir terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Ketiga

#### Eselonering

##### Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### UPTD Parkir

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 6

UPTD Parkir mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pengelolaan Parkir.

##### Paragraf 2

##### Fungsi

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala UPTD Parkir

#### Paragraf 1

#### Tugas

#### Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pengelolaan Parkir.

#### Paragraf 2

#### Fungsi

#### Pasal 9

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Parkir;
- c. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Parkir;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Parkir;
- e. melaksanakan pengkajian lokasi dan Satuan Ruang Parkir (SRP) dan Tarif;
- f. melaksanakan pemeliharaan terhadap terhadap rambu – rambu, marka, papan informasi tarif;
- g. mengkoodinir personil pemungutan retribusi parkir;
- h. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- i. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu;
- j. melaksanakan penanganan pengaduan pengujian;

- k. melaksanakan pengembangan metode dan standar analisa pengujian,
- l. menjaga komitmen manajemen mutu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- m. menjaga performa peralatan yang ada pada UPT Parkir;
- n. mengoordinasikan pemeriksaan kepada juru parkir berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pelanggaran;
- o. mengoordinasikan kebutuhan pelayanan perparkiran agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan;
- p. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Parkir;
- q. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan pengelolaan parkir ;
- r. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Parkir.
- s. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V

UPTD TERMINAL

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

UPTD TERMINAL

- (1) UPTD Terminal merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri atas :
1. Kepala;
  2. Subbagian Tata Usaha; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Eselonering  
Pasal 14

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
UPTD Terminal

Paragraf 1

Tugas

Pasal 15

UPTD Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan terminal.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;

- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala UPTD Terminal

#### Paragraf 1

#### Tugas

#### Pasal 17

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan terminal.

#### Paragraf 2

#### Fungsi

#### Pasal 18

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Terminal;
- c. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Terminal;
- d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Terminal;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan laporan pertanggung-jawaban dalam lingkungan terminal;
- f. mengoordinasikan pemeriksaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi syarat-syarat administrasi dan laik jalan yang memasuki dan keluar terminal;
- g. mengoordinasikan personil pada pos TPR sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas;
- h. mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang terminal untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan laporan pertanggung-jawaban dalam lingkungan terminal;
- j. mengoordinasikan pemeriksaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi syarat-syarat administrasi dan laik jalan yang memasuki dan keluar terminal;
- k. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Terminal;
- l. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan pengelolaan terminal ;
- m. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Terminal.
- n. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan,

keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

#### Paragraf 2

#### Fungsi

#### Pasal 20

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### B A B VI

#### UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 21

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan;

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
- Kepala;
  - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketiga

#### Eselonering

#### Pasal 23

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- Kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

### BAB VII

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Paragraf 1

#### Tugas

#### Pasal 24

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tugas

Pasal 26

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 27

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 sebagai berikut :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan

- bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - d. menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - e. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. mengoordinasikan pemeliharaan peralatan pengujian;
  - h. menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - i. membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya dalam kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - j. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di Lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - k. menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Paragraf 1

##### Tugas

##### Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 29

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- b. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris/aset kantor;
- d. melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VIII

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pada UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 30 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagai Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan diselenggarakan oleh Kepala UPTD, dan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas melalui Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 33

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Hak Mewakili

#### Pasal 34

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB X  
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

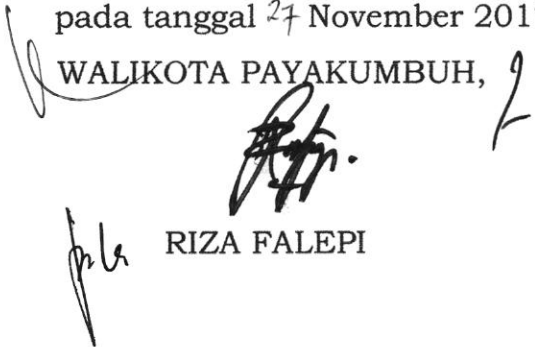
Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup UPTD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 27 November 2017  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 28 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
BENNI WARLIS

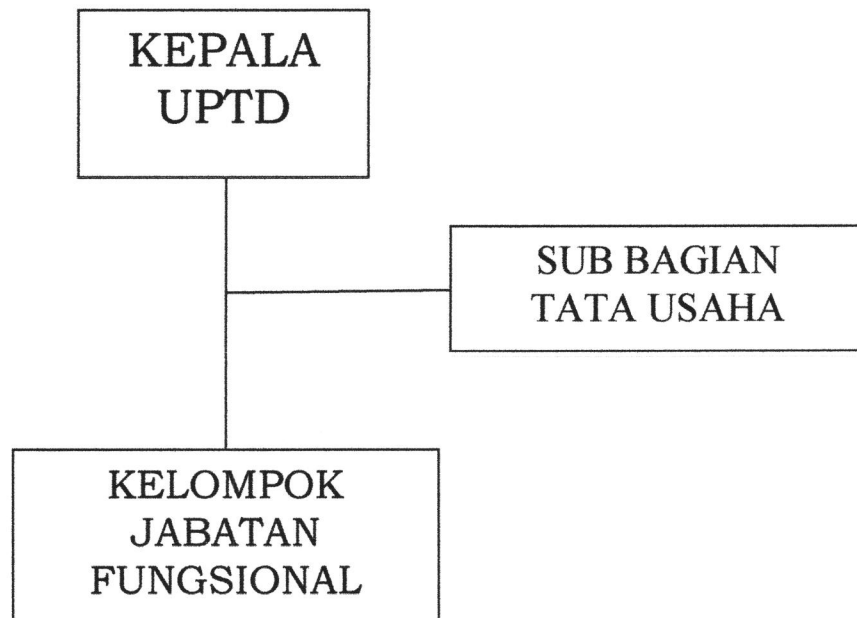
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 93

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 93 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PARKIR



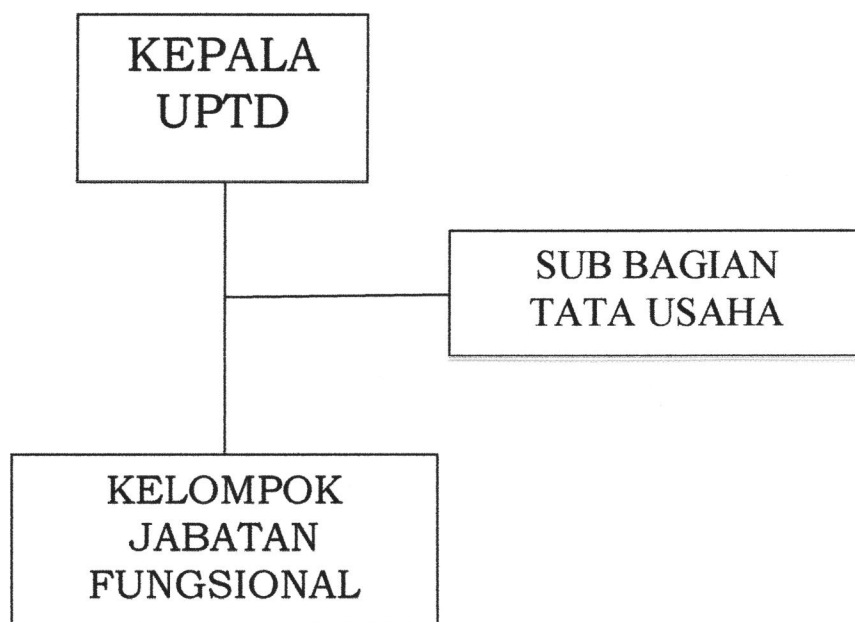
WALIKOTA PAYAKUMBUH, 9  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 93 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD TERMINAL



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

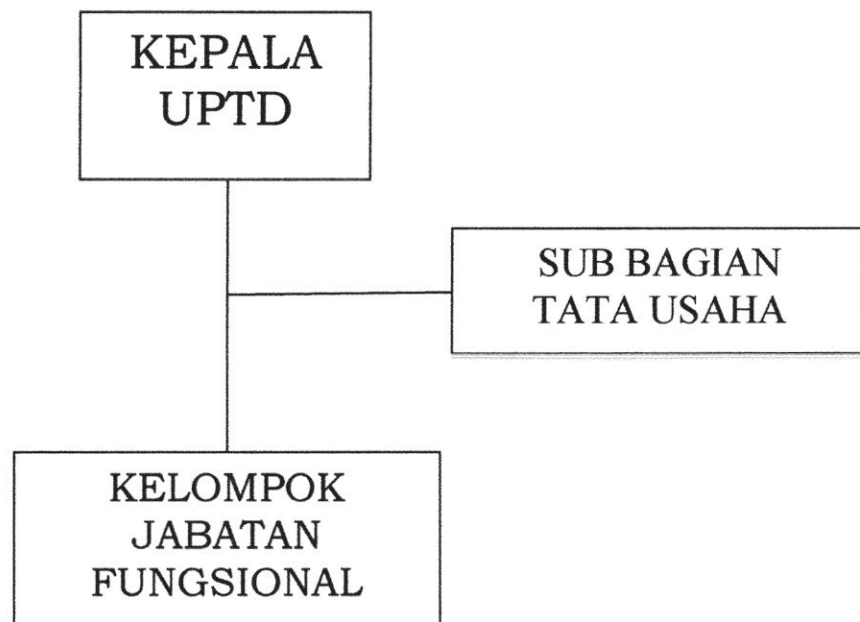
  
RIZA FALEPI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 93 TAHUN 2017

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH.

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI